

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA DENGAN AUDIT INTERNAL
SEBAGAI PEMODERASI**

Eri Oktavianingsih¹⁾, Joko Pramono²⁾, Maria Entina Puspita³⁾

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “AMA” Salatiga

E-mail: 2020115002@student.stieama.ac.id

^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “AMA” Salatiga

E-mail: mariaentina@stieama.ac.id*

Abstract

This research aims to determine the effect of accountability and transparency on the financial performance of the Salatiga City government with internal audit as a partial or simultaneous moderator. The population as research objects were financial management employees in the Salatiga City Government 54 people. This research method is explanatory, while the data analysis methods used are validity test, reliability test, moderated regression analysis test, t test, f test and coefficient of determination test. The results obtained are there is a significant influence of Accountability on Financial Performance, there is a significant influence of Transparency on Financial Performance, Internal Audit moderates the relationship between Accountability and Financial Performance, Internal Audit moderates the relationship between Transparency and Performance Finance. From the F test it can be concluded that Accountability, Transparency, the interaction of Accountability with Internal Audit and the interaction of Transparency with Internal Audit simultaneously have an influence on Financial Performance. The influence of Accountability and Transparency on the Financial Performance with Internal Audit as a moderating variable is proven by the Adjusted R Square value of 71.2% which means that X1, X2 moderated by Z have a contribution on Financial Performance (Y) of 71.2%.

Keywords : Accountability, Transparency, Internal Audit, Financial Performance.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah merupakan panduan dan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah daerah dianggap perlu untuk mempersiapkan instrumen yang tepat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, profesional dan akuntabel

sehingga bermuara pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah (Nasution, 2018). Kinerja instansi pemerintah daerah salah satunya diukur melalui akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah dengan baik untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan pengendalian kebijakan keuangan daerah secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (Pujanira & Taman, 2017). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Marcelleno et al., 2023).

Penelitian mengenai akuntabilitas, transparansi dan audit internal terhadap kinerja keuangan pemerintah sebelumnya pernah dilakukan Karim & Mursalim (2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan akuntabilitas, transparansi dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Demikian juga dengan Novitasari (2020) menunjukkan akuntabilitas, transparansi dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Gultom (2023) menunjukkan akuntabilitas, transparansi dan audit internal juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dalam penelitian tersebut dipaparkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak cukup hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tetapi juga harus memperhatikan kinerja keuangan tersebut yang meliputi pencapaian kinerja, keluaran, hasil dan manfaat serta tepat tidaknya sasaran kegiatan yang dibiayai anggaran. Hal ini juga didorong oleh transparansi berupa komunikasi yang baik antara pemerintah dengan publik dengan cara selalu mengomunikasikan melalui media massa secara terbuka dan hak masyarakat terhadap akses informasi seperti informasi yang cukup diberikan kepada publik tentang prosedur dan tanggung jawab organisasi yang sesuai tujuan organisasi. Sejalan dengan Karim & Mursalim (2019) yang menyebutkan bahwa adanya audit internal dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena didalamnya termasuk pengawasan yang dapat mengelola keuangan menjadi lebih baik, lebih efisien dan mengurangi risiko pemborosan, penyalahgunaan anggaran atau korupsi serta dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dalam suatu pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya akuntabilitas, transparansi dan audit internal.

Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Pera et al., (2021) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa sudah dilakukan transparansi mengenai informasi keuangan seperti anggaran pemerintah daerah, laporan keuangan, kebijakan dan program keuangan, rencana pembangunan, program-program yang sedang berjalan dan informasi terkait pengelolaan keuangan. Terdapat beberapa hal dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparan atau dapat diakses oleh masyarakat yaitu rincian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan dukungan media informasi yang terbatas secara umum mengenai organisasi perangkat daerah antara lain struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah yang menyebabkan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Veronika & Nugraeni (2023) juga menunjukkan transparansi dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini terjadi karena prinsip akuntabilitas

organisasi berlaku pada setiap tingkat atau unit organisasi. Setiap jabatan harus memberikan pertanggungjawaban atas laporan aktivitas kepada atasannya. Dalam hal ini poin-poin akuntabilitas harus diperhatikan kembali untuk menciptakan pengelolaan kinerja anggaran dengan baik.

Agar penyelenggaraan pemerintah daerah terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Belanja Daerah diarahkan pada upaya peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping untuk tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga kebijakan anggaran belanja daerah disusun dengan lebih mengutamakan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah, disusun berdasarkan pendekatan kinerja dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga.

Berdasarkan rilis dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga melalui website resminya <https://bpkpd.salatiga.go.id/> bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 (tujuh) tahun berturut – turut pada periode tahun 2016-2022. Hal ini membuktikan adanya keseriusan pemerintah Kota Salatiga dalam mewujudkan kinerja keuangan yang baik. Melihat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Salatiga dengan audit internal sebagai pemoderasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Slamet & Irmadiani, 2022). Populasi penelitian adalah seluruh pengelola keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang berjumlah 54 orang dengan rincian 27 orang Pejabat Penatausahaan Keuangan dan 27 orang Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD (BKPD Kota Salatiga, 2024). Karena jumlah anggota populasi dalam penelitian ini relatif kecil, maka semua anggota populasi penelitian yang berjumlah 54 orang dijadikan sampel penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018) metode sensus atau sampling total adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Maka sampel dari penelitian ini berjumlah 54 orang dengan rincian 27 orang Pejabat Penatausahaan Keuangan dan 27 orang Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD.

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan membuat daftar pertanyaan untuk beberapa responden Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kota Salatiga yang dibagikan langsung kepada responden penelitian, kemudian kuesioner diisi oleh responden lalu dikembalikan untuk diolah. Pertanyaan dalam kuesioner terkait dengan Kinerja Keuangan, Audit Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam OPD masing-masing. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota

Salatiga, gambaran tersebut mengenai hubungan antara variabel dependen (akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah) dengan variabel independen (kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Salatiga). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS dan kemudian dianalisis dalam berbagai uji statistik yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda dan MRA, serta koefisien determinasi.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang menggunakan anggaran (Syahirah et al., 2023). Kinerja keuangan menjadi pengukuran untuk memperjelas kapabilitas daerah selama menjalankan penerapan keuangan secara optimal demi menjaga pelayanan yang dikehendaki karena penilaian lebih tinggi merupakan keharusan yang patut dilakukan supaya pihak eksternal bersedia untuk menanamkan modal ke daerah tersebut (Banunaek et al., 2022). Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Wibawa et al., 2021). Kinerja keuangan daerah merupakan prestasi kerja atau pencapaian yang dapat diterima sebuah pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya dalam periode tertentu (Santoso et al., 2021). Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam otonomi daerah karena keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurus pemerintahan (Pandjaitan et al., 2018). Keuangan daerah yang baik dapat dilihat melalui kinerja keuangan daerah (Marzuki et al., 2022).

Audit Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur (standar) yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Rinaldi & Supriyono (2022) menyebut bahwa kegiatan audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik). Simanjuntak (2024) mengungkapkan bahwa audit internal dapat berperan dalam meningkatkan ketahanan pemerintah daerah terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan melalui berbagai cara, antara lain dengan menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal, mendeteksi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan keuangan, melakukan investigasi terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal.

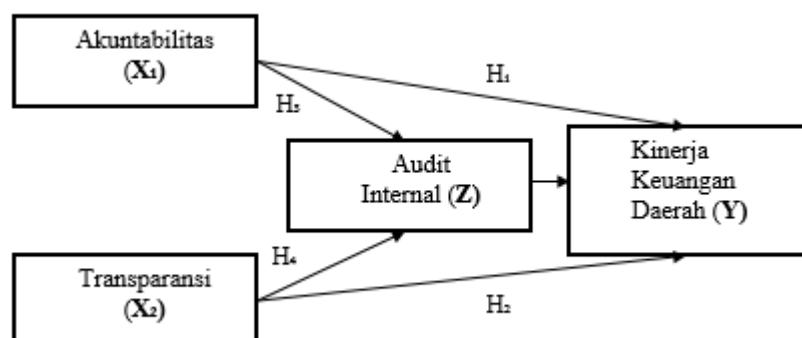
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Elkha & Wahidawati, 2020). Akuntabilitas juga merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sriwijayanti, 2021). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Edowati et al., 2021). Akuntabilitas merupakan alat untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang maupun pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan (Baviga, 2022). Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatannya terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik sebagai wujud penerapan good governance (Pangaribuan & Situmorang, 2024).

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Novatiani et al., 2019). Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi. Dalam hal keuangan daerah, transparansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Transparansi Keuangan Daerah seperti disebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 mencakup 2 (dua) hal yaitu ketepatan waktu dan keteraksesan. Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Sriwijayanti, 2021). Penelitian sebelumnya mengenai transparansi yang dilakukan oleh Ambarwati (2021) menjelaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan serta hak untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja (Kromen et al., 2023).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Tabel 1. Data Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	11	20,3%
2.	Perempuan	43	79,7%
Jumlah		54	100,0%

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1 pegawai pengelola keuangan pada OPD di Pemerintah Kota Salatiga yang menjadi responden penelitian ini sebagian besar adalah perempuan sebanyak 43 orang (79,7%) dan sisanya laki-laki 11 orang (20,3%). Rentang usia responden yang menjadi subyek penelitian didominasi pada rentang usia 36 - 45 tahun dengan jumlah 35 (64,8%) dilanjutkan dengan pada rentang usia 25 – 35 tahun dengan jumlah 15 orang (27,8%) dan 4 orang pada rentang usia 46 – 55 tahun dengan persentase 7,4% (lihat tabel 2)

Tabel 2. Usia Responden

	Usia	Jumlah	Persentase
1.	25 – 35 tahun	15	27,8%
2.	36 – 45 tahun	35	64,8%
3.	46 – 55 tahun	4	7,4%
Jumlah		54	100,0%

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Tabel 3. Jabatan Pegawai Pengelola Keuangan

No	Jabatan Pengelola Keuangan	Jumlah	Persentase
1.	Bendahara Pengeluaran	30	55,6%
2.	Pejabat Penatausahaan	24	44,4%
Jumlah		54	100,0%

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3 mengenai jabatan pegawai pengelola keuangan pada OPD di Pemerintah Kota Salatiga yang menjadi responden pada penelitian ini, jabatan sebagai bendahara pengeluaran adalah sebanyak 30 orang (55,6 %) dan pada pejabat penatausahaan keuangan ada 24 (44,4 %).

Tabel 4. Data Masa Kerja Pegawai

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	< 10 Tahun	18	33,3 %
2.	10 – 20 Tahun	23	42,6 %
3.	> 20 Tahun	13	24,1 %
Jumlah		54	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Tabel 4 menunjukkan masa kerja responden penelitian pada masa kerja 10-20 tahun dengan jumlah 23 orang (42,6 %), rentang masa kerja dibawah 10 tahun adalah sebanyak 18 orang (33,3

%) dan lebih dari 20 tahun sejumlah 13 orang (24,1 %). Berdasarkan tabel 5 yaitu mengenai data pendidikan responden, responden dengan latar belakang pendidikan mayoritas S1 sebanyak 30 orang (55,6%) diikuti oleh responden dengan latar belakang pendidikan D3 dengan 20 orang (37 %), kemudian 2 responden latar belakang pendidikan SMA/SMK (3,7%) dan pendidikan S2 sejumlah 2 responden (3,7%).

Tabel 5. Data Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA/ SMK	2	3,7 %
2.	D3	20	37 %
3.	S1	30	55,6 %
4.	S2	2	3,7 %
Jumlah		54	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018).

Tabel 6. Hasil Koefisiensi Uji Validitas

Item Pernyataan	Nilai r-hitung	Nilai r- tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X₁)			
Item 1	0,526	0,268	Valid
Item 2	0,677	0,268	Valid
Item 3	0,684	0,268	Valid
Item 4	0,491	0,268	Valid
Transparansi (X₂)			
Item 1	0,645	0,268	Valid
Item 2	0,699	0,268	Valid
Item 3	0,699	0,268	Valid
Audit Internal (Z)			
Item 1	0,875	0,268	Valid
Item 2	0,838	0,268	Valid
Item 3	0,778	0,268	Valid
Item 4	0,875	0,268	Valid
Kinerja Keuangan (Y)			
Item 1	0,542	0,268	Valid
Item 2	0,706	0,268	Valid
Item 3	0,631	0,268	Valid

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Dari tampilan tabel 6 diketahui bahwa nilai r-hitung untuk masing-masing butir pertanyaan lebih besar dari nilai r-tabel. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa jika r-hitung nilainya positif serta $>$ r-tabel maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas tersebut didapatkan r-hitung semua bernilai positif dan melebihi r-tabel (0,268). Hal ini berarti bahwa dapat dinyatakan bahwa masing-masing butir pertanyaan tersebut valid dan lebih lanjut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa Uji reliabilitas digunakan untuk menguji hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukurannya diulangi dua kali atau lebih. Uji reliabilitas ini menggunakan rumus alpha cronbach, yang mana instrumen dikatakan andal apabila memiliki koefisien reliabilitas (nilai alpha cronbach) diatas 0,700.

Tabel 7. Hasil Koefisien Uji Reliabilitas

Indikator	Alpha Cronbach	Alpha Cronbach Pembanding	Ket
Akuntabilitas	0,776	0,700	Reliabel
Transparansi	0,825	0,700	Reliabel
Audit Internal	0,932	0,700	Reliabel
Kinerja Keuangan	0,767	0,700	Reliabel

Sumber :Olah Data SPSS, 2024

Dari hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa masing masing variabel memiliki nilai alpha cronbach diatas 0,700 yang artinya reliabilitas kuesioner dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, Audit Internal dan Kinerja Keuangan Daerah dinyatakan reliabel dan dapat diterima. Lebih lanjut berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya kuesioner ini dapat digunakan untuk penelitian.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas yaitu Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.830	.732		2.500	.016
	Total_X1	.259	.075	.375	3.442	.001
	Total_X2	.447	.093	.524	4.819	.000

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Analisis Regresi Dengan Variabel Moderating

Variabel moderating adalah variabel independen yang akan menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Sujarweni, 2016). Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas yaitu Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kota yang dimoderasi oleh Audit Internal.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.713	9.200		.186	.853
	X1	-1.177	.526	-1.701	-2.236	.030
	X2	2.314	.976	2.715	2.369	.022
	X1Z	.104	.038	3.998	2.744	.009
	X2Z	.137	.067	4.476	2.040	.047
	Z	-.029	.658	-.049	-.043	.966

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer diolah, 2024

3.2. Pembahasan

Dari hasil analisis regresi moderasi (lihat tabel 9) diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara Akuntabilitas (X1) dengan Audit Internal (Z) sebesar 0,009 ($<0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa Audit Internal (Z) menguatkan pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Kinerja Keuangan (Y) di Pemerintah Kota Salatiga. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara Transparansi (X2) dengan Audit Internal (Z) sebesar 0,047 ($<0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa Audit Internal (Z) menguatkan pengaruh Transparansi (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y) di Pemerintah Kota Salatiga.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga

Berdasarkan pengolahan pada uji t (lihat tabel 8) untuk variabel Akuntabilitas (X1) terhadap Kinerja Keuangan (Y), didapatkan hasil bahwa t-hitung variabel Akuntabilitas (X1) senilai 3,442 lebih besar dari nilai t-tabel 2,009. Artinya terdapat pengaruh Akuntabilitas dengan Kinerja Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim & Mursalim (2019), Ifada & Ardini (2023) serta Pangaribuan & Situmorang (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan kinerja keuangan dibutuhkan pertanggungjawaban dan keterbukaan untuk diperiksa agar dapat membangun efektivitas dan efisiensi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pada hakekatnya akuntabilitas merupakan standar profesional yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mempertanggungjawabkan anggaran daerah kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Tidak adanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga

Variabel Transparansi (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y), didapatkan hasil bahwa t-hitung variabel Transparansi (X2) senilai 4,819 dan nilai t-tabel adalah 2,009, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,009 (lihat tabel 8). Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Dari hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh signifikan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dapat diterima. Untuk dapat menciptakan kinerja keuangan yang baik diperlukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elkha & Wahidawati (2020), Kromen et al., (2023) dan Eriva et al., (2024) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi transparansi yang dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Salatiga. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi yang dilakukan oleh pegawai pada Pemerintah kota Salatiga mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung karena pegawai akan melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur-prosedur pengelolaan yang telah disiapkan oleh pegawai sehingga memberikan dampak terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pera et al., (2021) yang menyatakan bahwa Transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ada beberapa hal dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparan atau dapat diakses oleh masyarakat, yaitu rincian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan dukungan media informasi yang terbatas secara umum mengenai organisasi perangkat daerah, antara lain struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah yang menyebabkan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan Internal Audit sebagai Pemoderasi.

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat diketahui besaran nilai t-hitung. Lebih lanjut akan ditampilkan data mengenai perbandingan antara t-tabel dengan t-hitung yang disajikan pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Nilai T-hitung dan Nilai T-Tabel

NO	VARIABEL	T-HITUNG	T-TABEL	Sig.
1	Akuntabilitas*Audit Internal	2,744	2,009	0,009
2	Transparansi*Audit Internal	2,040	2,009	0,047

Sumber : *Olah Data SPSS, 2024*

Hasil analisis tabel 10 menunjukkan variabel $X1*Z$ (interaksi antara variabel $X1$ dan Z) mempunyai t hitung sebesar 2,744 (lebih besar dari t -tabel. Ini berarti variabel Z (Audit Internal) memoderasi hubungan antara $X1$ (Akuntabilitas) dengan Y (Kinerja Keuangan). Lebih lanjut didapatkan nilai signifikansi variabel interaksi antara Akuntabilitas ($X1$) dengan Audit Internal (Z) sebesar 0,009 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Audit Internal (Z) menguatkan signifikansi Akuntabilitas ($X1$) terhadap Kinerja Keuangan (Y) di Pemerintah Kota Salatiga. Hasil uji hipotesis ketiga ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cholifah & Jaeni (2023) serta Febria et al., (2021). Akuntabilitas menuntut organisasi pemerintahan untuk juga melakukan pertanggungjawaban secara horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Oleh karena itu perlu disusun laporan yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Ada atau tidaknya audit internal dalam sebuah organisasi perangkat daerah, semua proses pengelolaan keuangan haruslah dilaksanakan dengan akuntabel. Dengan adanya proses pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sudah seharusnya laporan akuntabilitas publik disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan suatu daerah.

Transparansi pengelolaan keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Internal Audit sebagai Pemoderasi.

Hasil analisis tabel 10 menunjukkan variabel $X2*Z$ (interaksi antara variabel $X2$ dan Z) mempunyai t hitung sebesar 2,040 (lebih besar dari t -tabel. Ini berarti variabel Z (Audit Internal) memoderasi hubungan antara $X2$ (Transparansi) dengan Y (Kinerja Keuangan). Lebih lanjut didapatkan nilai signifikansi variabel interaksi antara Transparansi ($X2$) dengan Audit Internal (Z) sebesar 0,047 yang mana lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Audit Internal (Z) menguatkan signifikansi Transparansi ($X2$) terhadap Kinerja Keuangan (Y) di Pemerintah Kota Salatiga. Hasil uji hipotesis keempat ini sejalan dengan penelitian Herlina et al., (2021). Transparansi berarti keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi keuangan yaitu wujud pertanggungjawaban. Adanya audit internal dalam suatu organisasi perangkat daerah tidak terlalu berpengaruh terhadap transparansi suatu informasi keuangan terhadap masyarakat. Transparansi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga sektor publik dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Uji F

Uji F (F-test) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Akuntabilitas ($X1$), Transparansi ($X2$) secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan (Y) Pemerintah Kota Salatiga. Uji F (F-test) digunakan untuk menguji secara bersama-sama (simultan) apakah variabel bebas yaitu Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan menggunakan uji F statistik dengan kriteria penerimaan dan pengeluran bahwa apabila F -hitung $>$ F -tabel maka H_a diterima.

Tabel 11. Hasil Uji Anova^b

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.554	2	14.277	56.567	.000 ^b
	Residual	12.872	51	.252		

	Total	41.426	53			
a. Dependent Variable: Total_Y						
b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1						

Sumber :Data Primer yang diolah, 2024

Nilai F-tabel dengan jumlah responden sebanyak 54 adalah sebesar 2,79. Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis data didapatkan F-hitung adalah 56,567. Selanjutnya dapat dari perbandingan antara F-tabel dengan F-hitung dapat dinyatakan dimana F-hitung (56,567) > F-tabel (2,79). Dalam pengolahan dengan menggunakan uji F didapatkan pula nilai signifikan yang lebih kecil dari probabilitas yaitu 0,05 ($0,000b < 0,005$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) secara simultan atau secara bersama sama mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) Pemerintah Kota Salatiga. Dengan diterapkannya Akuntabilitas dan Transparansi yang dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka kinerja keuangan akan berjalan dengan baik.

Uji F (F-test) dengan variabel moderasi

Uji F (F-test) dengan pemoderasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Akuntabilitas (X₁), Transparansi (X₂), interaksi Akuntabilitas dengan Audit Internal (X₁*Z) dan interaksi Transparansi dengan Audit Internal (X₂*Z) secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan (Y) Pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan hasil pengujian Uji F dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 12. Hasil Uji Anova^b

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.607	5	6.121	27.159	.000 ^b
	Residual	10.819	48	.225		
	Total	41.426	53			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), Z, X1, X2, X1Z, X2Z						

Sumber :Data Primer yang diolah, 2024

Nilai F-tabel dengan jumlah responden sebanyak 54 adalah sebesar 2,41. Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis data didapatkan F-hitung adalah 27,159. Selanjutnya dapat dari perbandingan antara F-tabel dengan F-hitung dapat dinyatakan dimana F-hitung (27,159) > F-tabel (2,41). Dalam pengolahan dengan menggunakan uji F didapatkan pula nilai signifikan yang lebih kecil dari probabilitas yaitu 0,05 ($0,000b < 0,005$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), interaksi Akuntabilitas dengan Audit Internal (X1*Z) dan interaksi Transparansi dengan Audit Internal (X2*Z) secara simultan atau secara bersama sama mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) Pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan hasil Uji F tersebut, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil uji tersebut diatas, terdapat pengaruh signifikan antara Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), interaksi Akuntabilitas dengan Audit Internal (X1*Z) dan interaksi Transparansi dengan Audit Internal (X2*Z) secara bersama-sama (simultan) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan data untuk uji Koefisien Determinasi dapat diketahui sebagaimana Tabel 13 berikut ini :

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.830 ^a	.689	.677	.502
a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1				

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Untuk mengetahui besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* pada Tabel 13 yaitu sebesar 0,677 sehingga nilai Koefisien Determinasi adalah yang dilihat dari besaran nilai *Adjusted R Square* yaitu 67,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) secara bersama-sama memiliki kontribusi terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) Pemerintah Kota Salatiga sebesar 67,7%, sedangkan sisanya 32,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) dengan variabel moderasi

Hasil perhitungan data untuk uji Koefisien Determinasi dapat diketahui sebagaimana Tabel 14 berikut ini :

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.739	.712	.475
a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2, X1Z, X2Z				

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Untuk mengetahui besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* pada Tabel 14 yaitu sebesar 0,712 sehingga nilai Koefisien Determinasi adalah yang dilihat dari besaran nilai *Adjusted R Square* yaitu 71,2%. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya variabel moderasi yaitu Audit Internal (Z) memperkuat kontribusi Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) Pemerintah Kota Salatiga. Terbukti dengan kenaikan nilai koefisien determinasi yang sebelum dimoderasi sebesar 67,7% menjadi 71,2 % setelah dimoderasi oleh Audit Internal (Z).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kota Salatiga dengan Audit Internal sebagai Pemoderasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X_1) memiliki nilai 0,259 dan Transparansi (X_2) memiliki nilai 0,447 sehingga memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Ini berarti jika Akuntabilitas dan Transparansi semakin tinggi maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga juga akan semakin baik.
2. Hasil uji *Moderated Regression Analysis* menunjukkan bahwa variabel interaksi antara Akuntabilitas (X_1) dengan Audit Internal (Z) sebesar 0,009 ($< 0,05$) dan interaksi antara Transparansi (X_2) dengan Audit Internal (Z) sebesar 0,047 ($< 0,05$) artinya Audit Internal

- (Z) menguatkan pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y) di Pemerintah Kota Salatiga.
3. Hasil Uji t (Uji signifikansi parsial)
 - a. Terdapat pengaruh signifikan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Dari uji t yang telah dilakukan menunjukkan hasil t hitung $3,442 > t$ tabel 2,009 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.
 - b. Terdapat pengaruh signifikan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Dari uji t yang telah dilakukan menunjukkan hasil t hitung $4,819 > t$ tabel 2,009 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.
 - c. Audit Internal menguatkan signifikansi Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Dari uji t yang telah dilakukan menunjukkan hasil t hitung $2,744 > t$ tabel 2,009 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.
 - d. Audit Internal menguatkan signifikansi Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Dari uji t yang telah dilakukan menunjukkan hasil t hitung $2,040 > t$ tabel 2,009 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.
 4. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu $56,567 > 2,79$ yang artinya secara simultan Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.
 5. Dari hasil uji F dengan variabel moderasi Audit Internal menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu $27,159 > 2,41$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, interaksi Akuntabilitas dengan Audit Internal dan interaksi Transparansi dengan Audit Internal secara simultan atau secara bersama sama mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.
 6. Berdasarkan uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara bersama-sama memiliki kontribusi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga sebesar 67,7%, sedangkan sisanya 32,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi.
 7. Dari hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adanya variabel moderasi yaitu Audit Internal memperkuat kontribusi Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga. Terbukti dengan kenaikan nilai koefisien determinasi yang sebelum dimoderasi sebesar 67,7% menjadi 71,2 % setelah dimoderasi oleh Audit Internal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dimungkinkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemegang kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan. Saran disusun dengan maksud sebagai sarana untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan berkualitas antara lain yaitu:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Salatiga perlu terus ditingkatkan dengan cara memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi. Pelatihan untuk pegawai tentang pentingnya akuntabilitas juga dapat dilakukan.
2. Transparansi didorong untuk terus ditingkatkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti laporan keuangan dan kinerja dalam bentuk yang jelas dan sederhana.
3. Memperkuat fungsi audit internal dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi auditor. Audit internal harus berperan proaktif dalam memberikan rekomendasi yang bermanfaat

- untuk perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja audit internal dan memastikan adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil topik terkait keuangan daerah, dapat melakukan penelitian tersebut dengan menambahkan variabel terkait yang lain seperti sistem keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi serta dengan responden yang lebih bervariasi terkait dengan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A. (2024). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor." *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 74–87.
- Ambarwati, A. (2021). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi." *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(3), 88–96.
- Arifin, W., Muchlis, S., & Suhartono. (2021). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi." *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(3), 88–96.
- Artini, N. L. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 188–218.
- Atika, D., Junaidi, L. D., & Irmadhani, A. (2019). "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja serta Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan." *Jurnal Warta*, 13(4), 77–90.
- Aulia, Y., Pembangunan, U., Budi, P., Sari, D., Hasibuan, B., Pembangunan, U., Budi, P., Waruwu, H., Pembangunan, U., Budi, P., Gulo, P. D., Pembangunan, U., Budi, P., Nurhaliza, S., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang." *Journal of Student Research (JSR)*, 2(2), 79–86.
- Banunaek, I., Manafe, H., & Perseveranda, M. E. (2022). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59.
- Baviga, R. (2022). "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Skpd Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kerinci." *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 211–235.

- Cholifah, S., & Jaeni, J. (2023). "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Managerial Dengan Satuan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang 2022)." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1702–1714. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5412>
- Dwiyanto, A., & Rufaedah, Y. (2020). "Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)." *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 936–942.
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai." *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96.
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). "Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.
- Eriva, C., Handayani, M., & Dani. (2024). "Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 41–65.
- Fauziyah, M. (2017). "Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. (2021). "Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 37–44. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.3648>
- Ghozali, I. (2018). *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25."* Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, L. L. (2023). "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 1266–1285.
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). "Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System." *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 4(2), 419–433.
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). "Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan." *Equity*, 22(2), 153–172.
- Ifada, B. I., & Ardini, L. (2023). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(9).

- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah. (2020). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348.
- Karim, R. ., & Mursalim. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Ssistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan". 2.*
- Kromen, M., Manafe, H., & Persevaranda, M. . (2023). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah , Akuntabilitas , dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4).
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Azzahra Maharani Safitri, N., & Imanuel, L. (2023). "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 62–74.
- Mardiasmo. (2009). *"Akuntansi Sektor Publik."* Yogyakarta. Andi Offset.
- Marzuki, E., Sugeng Widiarto, D., Wahyudi, M., & Bambang Moertijoso, R. (2022). Kuasa Politik Ilmu Komunikasi di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(03), 405–413.
- Merchilia, S., & Robinson. (2024). "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5326–5338.
- Nasution, D. (2018). "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah." *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, Volume 2.*
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62.
- Novitasari, D. (2020). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11).
- Nugroho, R., & Prasetyo, N. (2018). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur." *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27.
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1398–1408.
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. (2024). "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam." *JRAK*, 10(1), 1–19.

- Pera, C. M. R. D. ., Ga, L. ., & Kiak, N. . (2021). “Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.” *Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 2020(1), 299–304.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar AKuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.” VI(4).
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Putra, G. (2017). “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.” *JOM Fekon*, 4(1), 163–177.
- Putra, S. (2022). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2020.” *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1), 1–13.
- Rinaldi, R. P., & Supriyono, R. A. (2022). “Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah).” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(4).

- Santoso, R., Syukri, M., Ermawati, D., & Hasanah, N. (2021). “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75–94.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014.” *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136–145.
- Sari, E. W. (2017). “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu.” *JOMFekom*, 4(1), 571–586.
- Sarmigi, E., & Maryanto, M. (2020). “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.” *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(1), 153–162.
- Simanjuntak, T. H. (2024). “Audit Internal terhadap Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 949.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
- Slamet, B., & Irmadiani, N. (2022). “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Bogor).” *Pulic Service and Governance Journal*, 03(01), 67–79.
- Sriwijayanti, H. (2021). “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang).” *Jurnal Ekobistek*, 7(1), 89–101.
- Sugiyono. (2018). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.”* Bandung. PT Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2016). *“Penelitian Akuntansi dengan SPSS.”*
- Syahirah, S., Yafiz, M., & Hasibuan, N. (2023). “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Menggunakan Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.” *Jurnal Akuntan Publik*, 1(4), 40–56.
- Veronika, P., & Nugraeni, N. (2023). “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value for Money.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 938–948.
- Wibawa, I. G. ., Sudemen, I. . ., & Sawitri, M. Y. (2021). “Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana.” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 142–159.

